

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1. Manajemen Laba

Menurut Na'im dan Setiawati (2000) manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Menurut Scott (2000) dalam Tumewu dan Rudiawarni (2014) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan manajer mengenai kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi laba untuk mendapatkan objek laba yang dilaporkan. Menurut Amperaningrum dan Sari (2013) manajemen laba merupakan kegiatan untuk memengaruhi angka pada suatu laporan keuangan, yang dapat menjadi faktor berkurangnya kredibilitas laporan keuangan.

Dari penjelasan dari beberapa peneliti dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan campur tangan manajemen untuk memengaruhi laba dengan menggunakan kebijakan akuntansi dan ditujukan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan berkurangnya kredibilitas laporan keuangan.

Manajemen laba dapat dihitung dengan menggunakan *Discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang memungkinkan suatu manajer dapat melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut tidak melihat nilai atau kondisi perusahaan yang sebenarnya (Guna dan Herawaty, 2010).

Bentuk – bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh manajer menurut Scott (1997), dalam Ekawati (2006), yaitu:

- a. *Taking a bath*. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer merasa dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam

organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

- b. *Income minimization* (menurunkan laba). Dalam bentuk ini manajer akan menurunkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan penghematan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Karena semakin rendah laba yang dilaporkan perusahaan, semakin rendah pula pajak yang dibayarkan. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun dapat ditutup dengan mengambil laba dari periode sebelumnya.
- c. *Income maximization* (meningkatkan laba). Dalam hal ini manajer akan berusaha menaikkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya menjelang IPO manajer akan meningkatkan laba dengan harapan mendapatkan reaksi yang positif dari pasar. Bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.
- d. *Income smoothing* (perataan laba). Dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi (calon) kreditor. Karena umumnya (calon) kreditor menyukai laba yang relatif stabil. Menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam melaporkan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

Menurut Scott (2009:403) dalam Oktafia (2013) motivasi perusahaan dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba yaitu :

1. *Bonus scheme* (program bonus) merupakan motivasi manajer yang bekerja di perusahaan dengan program bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.
2. *Debt covenant* (kontrak hutang jangka panjang) yaitu motivasi yang sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif

yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

3. *Political motivation* (motivasi politik) yaitu motivasi dari perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis yang cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.
4. *Taxation motivation* (motivasi perpajakan), perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.
5. Pergantian *CEO*, *CEO* yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan *CEO* yang kinerjanya kurang baik, ia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.
6. *Initial Public Offering* (penawaran saham perdana), pada saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan.

2.1.2. Mekanisme Corporate Governance

Menurut *Turnbull Report Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (dalam Effendi, 2016 edisi 2). Siswanto dan Aldridge (2005:2)

mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian dan pengawasan pada suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja badan usaha semaksimal mungkin tanpa merugikan *stakeholdernya*. Sulistyanto dan Wibisono (2003) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholder*. Dari penjelasan - penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal dan pengawasan dalam perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan tanpa merugikan *stakeholder* dalam jangka panjang.

Menurut Indra Surya 2006 (dalam Effendi, 2016 edisi 2) penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah .
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pada pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip – prinsip *corporate governance* (dalam Effendi, 2016:2) ada lima yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. Berikut penjelasan dari prinsip – prinsip *corporate governance* :

1. Transparansi

Prinsip ini mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2. Akuntabilitas

Prinsip ini mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung

usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3. Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggungjawab korporasi sebagai korporasi yang baik.

4. Independensi

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

5. Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas.

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional. Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas terlaksananya konsep *good corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dewan komisaris dapat dikatakan pula sebagai wakil dari para investor atau pemilik perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Dengan hak yang dimiliki dewan komisaris maka akan memberikan pengaruh dalam menekan manajemen dalam mengungkapkan informasi-informasi perusahaan salah satunya informasi mengenai tanggung jawab sosial atau CSR.

Komite audit berdasarkan Pedoman *good corporate governance* Indonesia, komite audit mempunyai tugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris. Tugas tersebut adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik (Untoro dan Zulaikha, 2013).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan aset manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen agar tidak terjadi kecurangan, atau dengan kata lain kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan.

2.1.3. Corporate Social Responsibility Disclosure

Corporate sosial responsibility menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (dalam Effendi, 2016 edisi 2). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).

Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan suatu komitmen dari perusahaan dengan melaksanakan etika keperilakuan, pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan .

Pengungkapan *corporate social responsibility* bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dalam aspek kegiatan operasinya (Djuitaningsih dan Marsyah (2012)). Penilaian *corporate social disclosure* dinilai menggunakan standart GRI (*Global Reporting Initiative*) meliputi Lingkungan 13, energi 7, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja 8, lain-lain tenaga kerja 29, produk 10, keterlibatan masyarakat 9, umum 2 (Pasaribu, kowanda dan kurniawan, 2015).

Ada empat manfaat csr jika perusahaan mengimplementasikan csr menurut (effendi,2016:2) :

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu perusahaan juga mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas .
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (modal).
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal –hal yang kritis (*critical decision marking*) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).

2.1.4. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency teori*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan agen (manajemen) dengan principal (pemegang saham) . Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (agen) yang merupakan pengelolaan perusahaan dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan (Indracahya dan Faisol, 2017). Teori ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang muncul akibat kurang lengkapnya informasi yang didapat saat melakukan kontrak kerja antara agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham), agen (manajemen) dapat memperoleh informasi yang lengkap dari pada principal hal ini akan menyebabkan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi dapat mendorong agen untuk dapat menyembunyikan beberapa informasi – informasi yang tidak diketahui oleh pihak *principal* (pemegang saham) untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen (manajemen) (Herlambang dan Darso, 2015).

2.1.5. Teori Legitimasi

Menurut Deegan (2000:253) dalam Fitri (2013), teori legitimasi meyakini bahwa suatu gagasan terdapat "kontrak sosial" antara organisasi dengan lingkungannya dimana organisasi tersebut beroperasi. Konsep "kontrak sosial" digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan image dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

2.1.6. Teori *Stakeholder*

Setiap *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh *stakeholders* terhadap organisasi, sekalipun *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun *stakeholder* tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi (Deegan, 2000) dalam Fitri (2013). Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan *stakeholder*, sehingga dapat dukungan dari para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisa	Simpulan
1	Inayah Adi Sari dan Anies Indah Hariyanti (2012)	Pengaruh <i>earning management</i> dan mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> serta implikasinya terhadap retron saham (studi empiris pada perusahaan manufaktur bidang perikanan yang terdaftar di BEI.	Analisis regresi berganda	Peneliti ini menyatakan bahwa <i>earning management</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan csr , mekanisme <i>corporate governance</i> : komposisi dewan direktur independen ,kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan csr . Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan csr. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan csr. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan csr. Dan pengungkapan csr tidak berpengaruh positi signifikan terhadap return saham.
2	Tita	Pengaruh Manajemen Laba	Analisi regresi	Peneliti ini

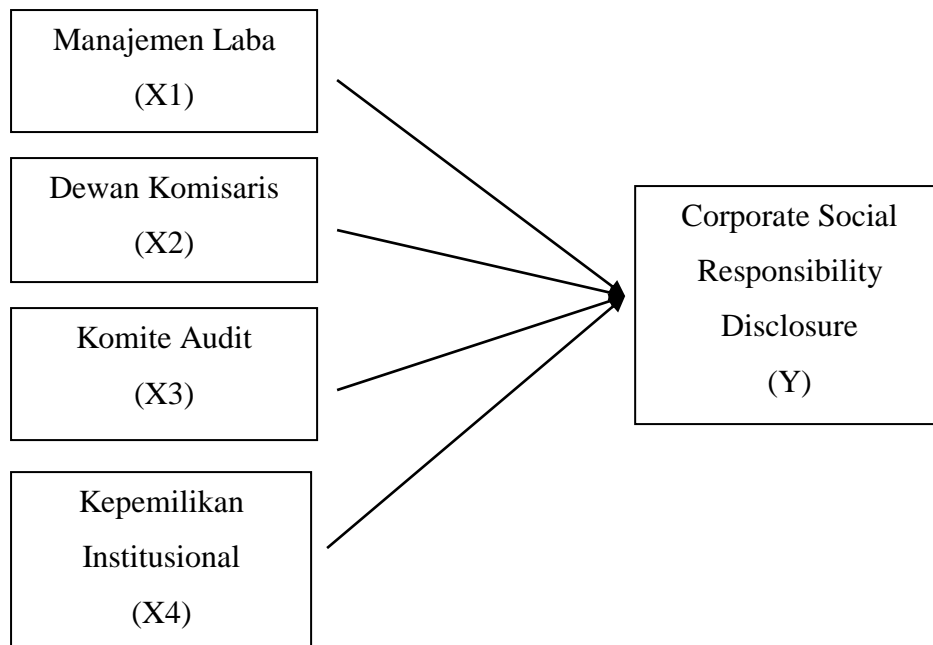
	Djuitaningsih dan Wahdatul A Marsyah (2013)	dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> peneliti ini menggunakan populasi di perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dan proper pada tahun 2008 – 2010.	berganda	menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap csrd. Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap csrd .Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap csrd.
3	Gita Mustika , Ria Nelly Sari dan Al Azhar L (2015)	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Responsibility</i> : variabel anteseden dan variabel moderasi peneliti ini menggunakan populasi diperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013.	<i>Structural Equation Model</i> (SEM) berbasis <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Penelitian ini mengemukakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap csr dan kompleksitas akuntansi dan efektifitas komite audit berperan dalam memperlemah laba dan pengungkapan csr.

4	Muhammad Titan Terzaghi (2012)	Pengaruh Earning Management dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Taggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.	Analisis regresi berganda	Penelitian mengungkapkan bahwa manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan ukuran dewan komisaris dan tipe perusahaan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
5	Wi Rita Widya dan Amelia Sandra (2014)	Pengaruh Earning Management dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen secara parsial

				berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Variabel kontrol ukuran perusahaan dan profitabilitas secara parsial tidak memberi pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
--	--	--	--	---

2.3. Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka kerangka pemikiran penelitian ini seperti gambar dibawah ini :



Keterangan gambar :

X1 : Manajemen Laba (Variabel Independen)

X2 : Dewan Komisaris (Variabel Independen)

X3 : Komite Audit (Variabel Independen)

X4 : Kepemilikan Institusional (Variabel Independen)

Y : *Corporate social responsibility disclosure* (Variabel Dependen)

→ : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh manajemen laba terhadap *Corporate Social Responsibility disclosure*

Imhoff dan Thomas (1994) dalam Djuitaningsih dan Marsyah (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan metode akuntansi yang lebih konservatif (dalam penelitian ini diproksikan dengan perusahaan yang terlibat untuk mengurangi manajemen laba) akan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada *stakeholder*. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan yang negatif antara manajemen laba dan pengungkapan informasi oleh perusahaan, dimana perusahaan yang mengurangi praktik manajemen laba akan mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai aktivitas perusahaan – perusahaan yang melakukan berbagai bentuk manajemen laba baik untuk keuntungan perusahaan akan kecenderungan untuk melakukan pengurangan pengungkapan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lobo dan Zhou (2001) juga memperoleh hasil penelitian yang sama. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu penentuan untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan manajemen laba adalah melihat kebijakan pengungkapan informasi perusahaan tersebut. Kebijakan yang mengatur syarat minimum dalam melakukan pengungkapan informasi memegang peran penting bagi kemampuan perusahaan untuk mengatur laba. Atas uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *CSR Disclosure*.

2.4.2 Pengaruh Dewan komisaris Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Sembiring, (2005) dalam Rahmawati, 2006). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Beasley (2000) dalam Rahmawati (2006).

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya, sehingga kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Rahmawati, 2006). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin et al. (2009) dalam Djuitaningsih dan Marsyah (2012), kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi akan lebih meningkat mengikuti penambahan anggota dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang lebih besar dipandang sebagai mekanisme corporate governance yang efektif untuk mendorong transparansi dan pengungkapan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen sesuai pedoman GCG Indonesia (KNKG). Semakin besar ukuran komite audit maka koordinasi antar anggota komite audit akan semakin baik. Selain itu semakin besar ukuran komite audit pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen akan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan

informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan (Nasir et al., 2014). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Hasil penelitian Waryanto (2010) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Corporate Sosial Responsibility, kepemilikan institusional yang tinggi dan presentase saham yang dimiliki oleh institusional Investor akan menyebabkan tingkat monitor lebih efektif, dengan demikian semakin tinggi kepemilikan institusi maka pengungkapan CSR akan semakin luas. Jika kepemilikan institusional lebih besar maka mengindikasikan kemampuannya memonitor manajemen, sehingga semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, dan tidak terjadi pemborosan. Kepemilikan institusional yang besar mempunyai kemampuan mengendalikan pihak-pihak manajemen dan manajemen tidak leluasa dalam mengambil keputusan termasuk dalam tanggung jawab sosial, karena selalu mendapat pengawasan dari pihak institusional yang ingin tidak adanya pemborosan, manajemen mendapat tekanan dalam mengambil keputusan baik dalam corporate sosial resposnsibility. Kepemilikan institusional yang besar mempunyai kemampuan mengendalikan pihak pihak manajemen dan manajemen tidak leluasa dalam mengambil keputusan termasuk dalam tanggung jawab sosial, karena selalu mendapat pengawasan dari pihak institusional yang ingin tidak adanya pemborosan, manajemen mendapat tekanan dalam mengambil keputusan baik dalam corporate sosial resposnsibility. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR